BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini yang dilakukan pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya untuk mengetahui analisis perhitungan harga pokok jasa dan penetapan tarif pengiriman paket internasional di PT POS Indonesia (Persero) Bandung.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Pos Indonesia adalah BUMN yang memberikan layanan komunikasi, keuangan, dan logistik di Indonesia dan sudah memiliki kantor di seluruh Indonesia, baik itu di kota maupun di pedesaan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1984 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos menugaskan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang pos. Produk yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia berupa layanan jasa serta penjualan perangko dan materai. Layanan jasa yang ditawarkan oleh pos antara lain kiriman internasional, *hybrid-mail*, ritel, logistik, keuangan, paket pos, dan surat pos.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor pos pertama kali didirikan di Indonesia oleh gubernur jendral GW Baron di Batavia (Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746. Tahun 1906 POS diberi nama Post Telegraafend Telefon Diensts, tanggal 27 September 1945 jawatan PTT Republik Indonesia ditandai pengambilalihan kantor pusat PTT di Bandung oleh angkatan muda PTT dari pemerintahan militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel.

Tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 240 status jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1965.

Status PN Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 pada tahun 1978. Tanggal 20 Juni 1995, berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan ; Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Persero (Lembaran Negara RI tahun 1995 nomor 11) ; Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998. Nama PT Pos Indonesia digunakan hingga sekarang. Selain itu PT. Pos Indonesia memiliki visi

dan misi serta arti logo yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya agar berjalan dengan efektif, yaitu sebagai berikut :

1. **Visi PT. Pos Indonesia :**

   Menjadi Perusahaan jejaring terintegrasi yang memberikan solusi terbaik bagi seluruh *stakeholder.*

2. **Misi PT. Pos Indonesia :**

   1. Secara terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan perusahaan sebagai infrastruktur jejaring terintegrasi di bidang komunikasi, logistic, layanan jasa keuangan dan ritel.
   2. Berupaya untuk mengembangkan secara berkesinambungan produk layanan komunikasi, logistik, layanan jasa keuangan dan ritel yang bernilai tinggi sehingga menjadi pilihan utama *stakeholder.*
   3. Menigkatakan kapasitas perusahaan dalam membangun serta mengembangkan bisnis melalui pendekatan aliansi strategis.
   4. Berusaha secara terus menerus mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai- nilai serta memeiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan global.

Sedangkan tujuan umum dari PT. Pos Indonesia (persero) adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang luas, tertib, lancar, aman, cepat dan efisien dengan harga yang terjangkau masyarakat serta mampu menunjang kehidupan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan keseluruh wilayah tanah air.

Jaringan pelayanan kantor pos sendiri mempunyai 27.448 titik pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dijelaskan sebagai berikut :

Kantor Pos	4.828 Unit
Terminal Pos Keliling Kota	1.386 Unit
Terminal Pos Keliling Desa	10.363 Unit
Unit Pelayanan Pos Lainnya	9.602 Unit

Wilayah usaha pos sebagai unsur pelaksanaa ditingkat daerah, terbagi menjadi 11 wilayah usaha, yaitu :

1. Wilpos I : D.I Aceh dan Sumatera Utara
2. Wilpos II : Sumatera Barat dan Riau
3. Wilpos III : Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu
4. Wilpos IV : DKI Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi
5. Wilpos V : Jawa Barat
6. Wilpos VI : Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
7. Wilpos VII : Jawa Timur
8. Wilpos VIII : Bali, NTT dan NTB
9. Wilpos IX : Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
10. Wilpos X : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
11. Wilpos XI : Maluku dan Irian Jaya

3. Arti Logo PT. Pos Indonesia



Sumber : Humas PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandung, 2010
Gambar 4.1 Logo PT. Pos Indonesia

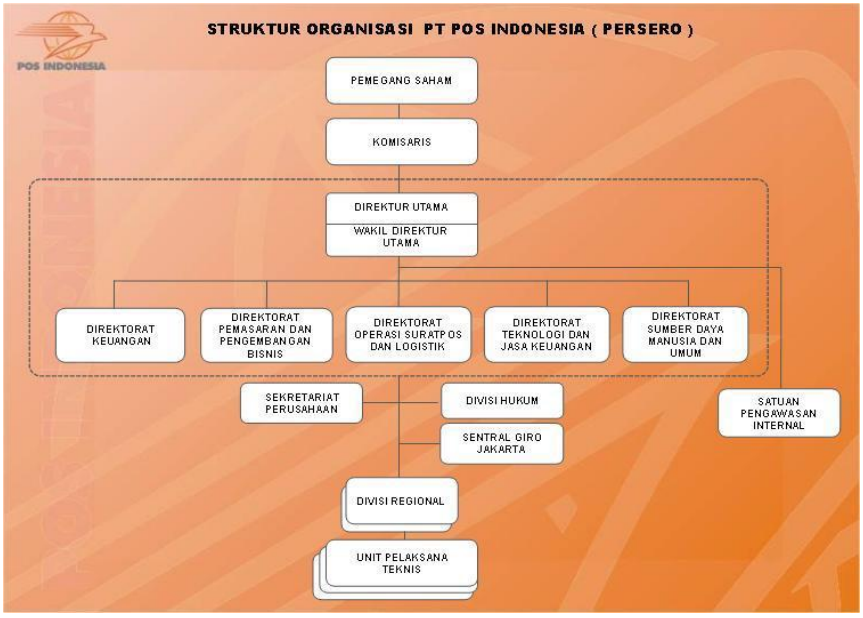
Pada logo PT. Pos, burung Merpati Pos yang siap terbang mengelilingi dunia telah bebas tak terkurung oleh segi-lima dan padi kapas, berjalan semakin cepat, divisualisasikan dengan sayap yang bergaris – garis horisontal dan proporsi burung yang lebih memanjang dan mengecil di ujung, usaha untuk memvisualisasikan kecepatan. Ukuran burung lebih besar dibandingkan dengan bola dunia, dapat terbaca bahwa burung dapat menguasai dunia. Warna jingga digunakan untuk menandakan, sesuatu yang penting, warna ini juga digunakan untuk tiang-tiang pemisah pada perbaikan di jalan tol, seragam tukang parkir, pakaian penerbang, pakaian pendaki gunung, warna yang kontras dengan warna-warna alam yang kebanyakan berwarna hijau, coklat, biru.

Tulisan dengan tipografi bold : **POS INDONESIA**, adalah nama perusahaan dengan identitas negara, berada di bawah gambar burung dan bola dunia, disini terbaca bahwa yang utama adalah profesionalitas dibidang usaha, dengan slogan “Untuk anda kami ada”. untuk menambah kesan mengutamakan pelayanan.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam surat keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 208/Dirut/1997 pimpinan perusahaan adalah Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), sebagai salah satu kesatuan yang utuh dimana segala sesuatu diputuskan secara musyawarah dan mufakat dan menjadi tanggung jawab bersama. Adapun Struktur PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandung yang dapat dilihat pada gambar 4.2.

Struktur organisasi PT. Pos Indonesia



Sumber : Humas PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandung, 2010

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia

4.1.1.3 Job Description

Dalam perusahaan masing-masing bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab, begitu pula dengan bagian-bagian yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) Bandung, yaitu sebagai berikut :

Tugas dan wewenang Pemegang Saham :

Tugas pemegang saham di dalam PT Pos Indonesia adalah sebagai pemberi saham kepada perusahaan dan juga bertugas mengawasi jalannya kinerja perusahaan.

Tugas Pokok dan wewenang Komisaris :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Persero, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan RUPS.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut

Tugas Pokok dan wewenang Direktur Utama :

1. Untuk dan atas nama Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas segala ketetapan RUPS.
2. Bertindak atas nama Direksi sebagai wakil perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan melakukan segala tindakan atau perbuatan baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan serta mengikat kerjasama dengan pihak lain.
3. Mengkoordinasikan dan mengandalkan pelaksanaan tugas direktur, kepala satauan pengawas intern, sekretaris perusahaan, kepala pusat penelitian dan pengembangan dan kepala wilayah usaha pos serta mengusulkan dan memimpin rapat direksi.
4. Menerima pertanggungjawaban pelaksana tugas kepala satuan pengaws intern.
5. Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan pengembangan perusahaan dan kebijaksanaan lainnya yang bersifat umum.

Direktorat Operasi :

Dipimpin oleh direktorat operasi, mempunyai tugas pokok menetapkan jaringan lalu lintas pos dan jaringan layanan serta kebijakan penetapan modal transportasi serta pengembangan fisik pelayanan.

Direktorat Operasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan operasi pelayanan serta jaringan pelayanan unit dan titik layanan.
2. Pengendalian dan pengembangan mutu layanan meliputi standar layanan, pengendalian dan pengembangan mutu pelayanan operasional jasa komunikasi, logistic, keuangan, serta filateli.
3. Pengelolaan serta pengendalian usaha bisnis komunikasi, logistic, keuangan, keagenan dan filateli serta pembinaan dan pengendalian kegiatan promosi dan penyelenggaraan kesekretariatan Direktorat Operasi.

Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana

Dipimpin oleh direktur perencanaan, teknik dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana strategis, rencana bisnis dan rencana jangka pendek yang relevan sebagai tahapan pencapaian tujuan perusahaan dan melakukan aktivitas rekayasa proses bisnis serta sarana dan properti. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan serta penyelenggaraan kegiatan perencanaan strategis serta pengelolaan dan pengolahan data.
2. Penetapan kebijakan dan analisis kebutuhan teknologi dan sarana.
3. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Direktorat Perencanaan Teknik dan Sarana.

Direktorat Keuangan

Dipimpin oleh direktorat keuangan mempunyai tugas membina dan mengelola keuangan perusahaan dan penyertaan modal perusahaan serta menetapkan kebijakan harga pokok produksi. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

1. Pengendalian keuangan perusahaan meliputi penetapan dan pengembangan kebijaksanaan system prosedur akuntansi, anggaran dan investasi serta struktur biaya dan harga pokok produksi.
2. Pengelolaan keuangan meliputi penetapan dan pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan, pengelolaan kas serta pengendalian penyertaan modal perusahaan.

Direktorat Sumber Daya Manusia

Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki fungsi perencanaan, penetapan, pengendalian dan pengembangan arah kebijakan strategis sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mebina,mengelola, dan memelihara kesejahteraan sumber daya manusia serta mengembangkan organisasi sistem manajemen.

Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretariat adalah perencanaan, penetapan, pembinaan, pengendaliaan, dan pengembangan arah kebijakan strategis kegiatan kesekretariatan direktur utama, bidang hukum, komunikasi korporat, dokumentasi serta pemberian rekomendasi strategis perusahaan dan pengkoordinasian seluruh kegiatan angota direksi dan unit perusahaan yang terkait.

Pusat Manajemen Perusahaan

Pusat manajemen perubhan mempunyai fungsi perencanaan, penelitian, penetapan, pembinaan, pengendaliaan dan pengembangan formulasi arah strategis korporat, skenario investasi, portofolio bisnis, sistem mutu perusahaan, budaya perusahaan. *Good corpoorate governance* (GCG) serta pengelolaan perubahan organisasi dan proses bisinis terkait dengan tuntutan perubahan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Satuan Pengawas Intern

Satuan pengawas intern (SPI) mempunyai fungsi perencanaan, penetapan, pembinaan,pengendalian dan pegembangan arah strategis pemeriksaan intern perusahaan dengan menetapkan 5C (*Complience, Catayst, Consultan, Competence* dan *College*) dan sesuai dengan standar / norma pemeriksaan yang berlaku dan pemberian saran saran perbaikan serta untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan.

4.1.1.4 Aktivitas Perusahaan

PT Pos Indonesian (Persero) yang dibentuk berdasarkan PP No.9 Tahun 1979 dan PP No.37 1985 bertujuan untuk membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro guna mempertinggi kelancaran hubungan untuk menunjang pembangunan nasional, dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin keseluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa.

Kegiatan utama dari Pos adalah menyediakan layanan jasa kepada masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu, pos juga menjual benda-benda pos seperti perangko dan materai.

PT Pos Indonesia (Persero) pada hakekatnya memberikan beberapa jenis pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan Secara Umum
   a. Berita : surat, warkat, kartu pos
   b. Uang : wesel pos dan giro
   c. Barang : paket pos
   d. Keagenan : melaksanakan pekerjaan pemberian jasa atas nama dan untuk kepentingan pihak ketiga baik instansi pemeintah maupun perorangan dan memperoleh imbalan jasa tertentu.
2. Pelayanan Secara Khusus, yaitu guna memenuhi permintaan mayarakat akan pelayanan yang serba cepat. Saat ini PT Pos Indonesia (Persero) telah menyediakan beberapa pelayanan khusus antara lain :

a. Pos Patas

   Untuk menyediakan berita dalam negeri yang memberikan waktu tempuh minimal 12 jam saat pemberangkatan.

b. Pos Canta (pos cepat antar kota)

   Pelayanan pos cepatdi kota-kota besar dengan fasilitas istimewa yang dirancang untuk tba ditangan penerima dengan waktu yang secepat mungkin.

c. RATRON (surat elektronik)

   Memanfaatkan sistem akuntansi, pengiriman surat, dokumentasi, data otentik, dan yang lainnya dapat lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Waktu tempuh untuk RATRON maksimum 6 jam dari saat pengiriman.

d. Cek Pos Wisata

   Memberikan kemudahan bagi wistawan yang melakukan pejalanan keseluruh nusantara, PT Pos Indonesia menerbitkan Cek Pos Indonesia yang dapat digunakan diseluruh kantor pos dan sentral giro diseluruh Indonesia.

e. WESTRON (wesel pos elektroik)

   Wesel pos yang penerusnya dilakukan melalui transaksi elektronik.

f. Wesel Pos Kilat Khusus

   Mengirim uang dengan cara lebih cepat yang jangkauannya telah tersebar secara meluas dan mantap diseluruh Indonesia.

Adapun layanan jasa lain yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia yaitu, kiriman internasional, *hybrid-mail*, ritel, logistik, keuangan, paket pos dan surat pos. Kiriman internasional terdiri dari *express post*, *Express Mail Service (EMS)*, paket pos internasional dan wesel pos internasional. *Express post* adalah suatu layana pengiriman dokumen dan barang ekspres dengan jangkauan lebih dari 200 negara dengan fasilitas track & trace. *Express Mail Service (EMS)* merupakan layanan Premium PT Pos Indonesia (Persero) untuk pengiriman dokumen dan barang dagangan ke luar negeri. Kiriman express ke 83 negara yang masuk dalam jaringan *Express Mail Service (EMS).* Pengiriman maupun penerimaan dapat melakukan pelacakan kiriman secara elektronik. Paket pos internasional merupakan pelayanan pengiriman barang ke 184 negara, baik paket pos internasional udara maupun paket pos internasional laut, dan wesel pos internasional adalah layanan pengiriman uang dari dan ke 14 negara (Brunai, Hongkong, Iran, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Qatar, Singapore, Uni Emirat Arab, Austria, Brazil, Taiwan, Thailand) dan dapat dilayanioleh seluruh kantor pos *online* wesel pos.

Hybrid-mail/surat elektonik/ratron, adalah salah satu layanan berupa layanan pengiriman berita dan spesifikasi hybrid karena dapat diakses pengguna jasa baik melalui internet berbasis web (sedang dalam proses pembangunan) dan *Short Message Service (SMS)* melalui nomor **8161** (saat ini hanya untuk Telkomsel dan Indosat) yang kemudian dapat diterima oleh tujuan dalam bentuk surat maupun kartu. Ratron memiliki desain baku yang dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan hari besar keagamaan dan hari-hari istimewa lainnya

seperti; Selamat Lebaran Idul Fitri, Selamat Natal, Selamet Tahun Baru, Selamat Imlek, Galungan dan Ucapan Selamat Ulang Tahun yang diranceng sesuai kebutuhan pelanggan.

Ritel atau kiospos merupakan jasa penyediaan sarana bagi transaksi layanan pos dan penyewaan *space* kepada mitra yang ingin memanfatkan kiospos sebagai mediator dalam menjembatani interaksi antara konsumen dengan produknya serta penjualan barang *merchandise* berupa *complementary & related product* dengan operasi layanan pos, dalam rangka memperkuat posisi kiospos sebagai *speciality store & business center*.

Pelayanan jasa logistik terdiri dari *customized*, layana kargo, dan layanan logistik lainnya. *Customized* adalah layanan pengiriman barang dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan permintaan atau kesepakatan, sedangkan untuk layanan kargo terdapat dua pilihan bagi pelanggan, yaitu *point to point*, dan kargo pos (paket pos optima). Sedangkan layanan logistik lainnya antara lain *warehousing*, *customs clearance, management inventory, marking & labelling/praposting*, dan *tracking.*

Layanan keuangan merupakan layanan yang ditawarkan oleh kantor pos untuk memudahkan para pelanggannya dalam mengirim uang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adapun jenis layanan keuangan yang ditawarkan kantor pos adalah sebagai berikut :

a. SOPP (*System Online Payment Point*)
b. Wesel Pos Standard

c. Wesel Pos Prima

d. Wesel Pos Instant (*Remittance*)

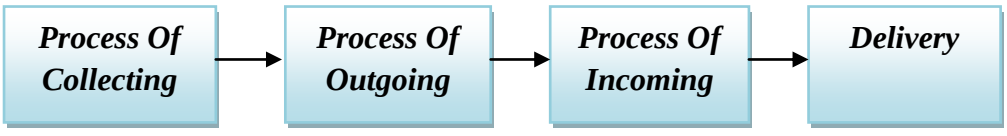
e. Wesel Pos Berlangganan

f. Wesel Pos Luar Negeri (*Western Union*)

Sedangkan untuk surat pos terdapat beberapa jenis layanan, yaitu surat pos biasa, surat pos kilat khusus, pos *express*, surat pos tercatat, dan surat pos kilat. Untuk jenis layanan paket pos terdiri dari paket pos biasa dan paket pos kilat khusus.

Proses pengiriman paket internasional di PT Pos Indonesia dilakukan setiap hari kerja. Dalam proses pengirimannya terdapat beberapa tahapan, yaitu proses *collecting*, proses *outgoing*, proses *incoming*, dan *delivery*. Untuk proses *collecting* dan proses *outgoing* dilakukan dikantor pos asal, sedangkan proses *incoming* dilakukan di KTSH (Kantor Tukar Suekarno-Hatta).

Untuk pengiriman paket luar negeri, komponen biaya yang ditetapkan oleh pos internasional melalui surat KSBU Pos Internasional No 894/SBU Pos Int/0609 tanggal 29 Juni 2009, komponen-komponen biaya tersebut adalah biaya angkutan udara luar negeri, tarif ganti ongkos, *air conveyance duse*, biaya ADM dan *security charge*.



Gambar 4.3 Proses Pengiriman Paket Internasional Di PT Pos Indonesia

Procces Of Collecting atau proses pengumpulan paket dilakukan di kantor pos masing-masing daerah. Dalam proses ini paket-paket tersebut di masukkan ke kantung-kantung sesuai dengan tujuannya. Untuk wilayah Jawa Barat proses *collecting* dilakukan dikantor pos pusat. Setelah proses *collecting* selesai maka dilakukan proses *outgoing*. Proses *outgoing* yaitu persiapan yang dilakukan oleh pos untuk mengirim paket-paket tersebut menuju bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Proses *outgoing* dapat dilakukan dengan menggunakan jalur udara dan darat atau menggunakan jalur darat saja. Untuk yang menggunakan jalur udara dan darat adalah proses *outgoing* yang berada di wilayah pos I, II, III, VIII, IX, X dan XI.

Saat paket-paket tersebut sampai dikantor tukar Soekarno-Hatta, dilakukan proses *incoming* atau proses kedatangan paket dari masing-masing wilayah pos yang ada di Indonesia. Proses *incoming* meliputi penerimaan dan pemeriksaan kantung-kantung paket di bagian manajer pengolahan pos di KTSH (Kantor Tukar Suekarno-Hatta), *grouping* atau sortir kantung, mencocokan jumlah kantung dengan data dari kantor wilayah pos dan menyerahkan kantung ke bagian puri terima. Puri terima melakukan beberapa proses, diantaranya melakukan pencocokan jumlah kantungyang diterima dari bagian manajer pengolahan dengan jumlah kantung yang tertulis dalam buku serah, membuka kantung yang berisi paket-paket tersebut untuk dilakukan *scan* dengan menggunakan aplikasi yang terdapat di puri terima, dan memasukkan paket-paket tersebut ke dalam kantung beserta DO-nya. Setelah proses-proses tersebut selesai dilakukan oleh puri terima maka kantung-kantung yang telah siap untuk dikirim tersebut diberikan kepada bagian ekspedisi untuk dilakukan proses *delivery*.

Proses *delivery* dilakukan oleh bagian ekspedisi, proses tersebut meliputi penerimaan kiriman dari bagian puri, membuka kantung dan mencocokkan isinya dengan buku sejarah atau DO, membubuhkan cap dan tanggal pada kiriman paket, menyortir per wilayah antar, menyerahkan ke pengantar dengan bukti serah, menerima kembali kiriman yang telah disortir, melakukan *scan barcode* per pengantar pada aplikasi DO, mencetak *delivery order*, dan menyerahkan paket-paket tersebut ke bagian pengiriman. Untuk paket pos internasional pengiriman dilakukan dengan menggunakan jalur udara atau jalur laut.

4.1.2 Komponen Biaya Harga Pokok Jasa Di PT Pos Indonesia

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari pihak perusahaan, perusahaan menggunakan metode sendiri yang telah ditentukan dalam menghitung harga pokok jasa paket internasionalnya. Perhitungan yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan semua komponen-komponen biaya yang terlibat dalam jasa paket inernasional tersebut. Komponen-komponen biaya tersebut adalah biaya *handilng* kantor pos, biaya angkutan dalam negeri, biaya *handling* KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta), biaya *allowance*, biaya o*verhead*, inflasi, biaya angkutan udara luar negeri, tarif ganti ongkos, *air conveyance duse*, biaya ADM dan *security charge*.

Berikut merupakan perhitungan komponen biaya harga pokok jasa paket pos internasional :

a. Biaya *Handling* Kantor Pos Negara Asal

Handling kantor pos Negara asal merupakan aktivitas penanganan paket yang dikirim ke Negara tujuan di kantor pos Negara asal, kegiatan handling ini meliputi *collecting, outgoing, incoming, delivery* dan *reporting*. Biaya handling kantor pos Negara asal merupakan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya handling kantor pos Negara asal ini meliputi aktivitas pekerja yang terlibat dalam proses pengiriman paket pos internasional.

Dalam menetapkan biaya tenaga kerja langsung, perusahaan menghitung berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh setiap karyawan. Perusahaan menetapkan anggaran jumlah paket yang diterima setiap harinya yaitu sebesar 120 paket per hari. Sedangkan untuk perhitungan biaya handling kantor asal didapat dari jumlah paket pos Kg pertama dibagi dengan kurs dolar, karena tarif pengiriman pos internasional ini menggunakan mata uang USD.

b. Biaya Angkutan Dalam Negeri

Biaya angkutan dalam negeri dipergunakan untuk membiayai pengiriman paket dari kantor pos yang berada di masing-masing cabang kantor pos ke kantor pos pusat menuju Kantor Tukar Soekarno-Hatta. Kota Bandung merupakan kantor pos wilayah V, daerah Bandung yang masuk ke Wilayah Pos V meliputi seluruh daerah yang berada di Jawa Barat.

Dalam melakukan pengiriman paket, perusahaan menggunakan jalur darat dengan kapasitas kendaraan sebesar 8 ton (8000 Kg), namun hanya digunakan sebesar 59%. Tarif per ton kendaraan adalah sebesar Rp 3,344 maka didapat tarif angkutan per Kg sebesar Rp 0.71. Jarak yang ditempuh adalah 600 Km, ditambah jarak dari MPC-KTSH sejauh 80 km (40 km x 2).

c. Biaya *handling* KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta)

Biaya *handling* KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengirim paket tersebut ke Negara tujuan, biaya ini dikeluarkan di bandara Soekarno-Hatta. Berikut merupakan rincian dan perhitungan biaya handling KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta), rincian biaya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Dari rincian biaya tersebut, maka dapat diketahui biaya yang dikenakan di KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta) untuk melakukan pengiriman paket per Kg. Tabel perhitungan biaya handling KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta) dan daftar biaya handling KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta) dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3.

Berdasarkan perhitungan biaya tersebut dapat diketahui, biaya handling di KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta) adalah sebesar US $ 0.253/Kg. yang dapat lihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1
Rincian Biaya handling KTSH
(kurs 1$=Rp 9,850)

Jenis Biaya	Biaya	
Biaya gudang KTSH (termasuk ppn)	Rp	286/Kg
Kiriman luar negeri outgoing	US $	0.03/Kg
Kiriman luar negeri incoming	US $	0.04/Kg
Kiriman luar negeri incoming + outgoing	US $	0.06/Kg
Biaya X-Ray Outgoing	Rp	60/Kg
Biaya X-Ray Incoming	Rp	50/Kg
GIA		
Fuel surcharge tujuan *middle east* (Jeddah, Riyadh)	US $	0.64/Kg
Fuel surcharge tujuan selain *middle east*(Jeddah, Riyadh)	US $	0.13/Kg
Biaya handling outgoing	Rp	649/Kg
Biaya handling incoming	Rp	649/Kg
Biaya Sewa gerobak per bulan	Rp	470,80/Kg
Biaya Sewa gerobak per hari	Rp	15,696
Kapasitas per gerobak		600 Kg
	Rp	26.16/grbk
Biaya Sewa gerobak+ppn per Kg	Rp	28.78

Sumber : PT. Pos Indonesia (data diolah)
Juli 2010

Tabel 4.2
Perhitungan Biaya handling KTSH
(Kurs 1$=Rp 9,850)

Jenis Biaya	Rp (Per Kg)	US $ per (Kg)
Biaya X-Ray outgoing	60	
Biaya handling outgoing	649	
Biaya sewa gerobak	28.78	
Total (Rp)	737.78	0.07
Biaya gudang		0.03
Biaya *fuel surcharge*		0.13
Sub jumlah biaya handling KTSH		0.23
Biaya Konsensi (10%)		0.023
Biaya handling di KTSH		0.253

Sumber : PT. Pos Indonesia (data diolah)
Juli 2010

Tabel 4.3
Daftar Biaya Handling KTSH Berdasarkan Berat

TINGKAT BERAT (GRAM)	Selain Middle East (Riyadh, Jeddah)
	US $
500	0.253
1000	0.253
1500	0.506
2000	0.506
2500	0.759
3000	0.759
3500	1.012
4000	1.012
4500	1.265
5000	1.265
per 500	0.253

Sumber : PT. Pos Indonesia (data diolah)
Juli 2010

d. Biaya *Allowance*

Biaya *allowance* adalah biaya yang disisihkan oleh perusahaan untuk keperluan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. PT Pos Indonesia menetapkan biaya *allowance* sebesar 5 % dari jumlah biaya yang dikeluarkan didalam negeri *(handling* kantor asal dalam negeri, angkutan dalam negeri dan handling Kantor Tukar Soekarno-Hatta).

e. Biaya *Overhead*

Biaya *overhead* adalah biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, seperti biaya tenaga kerja langsung, biaya penyusutan dan lain-lain. Biaya *overhead* yang digunakan di PT Pos Indonesia berupa tarif dalam satuan persen yaitu sebesar 15% dari jumlah biaya dalam negeri dan biaya allowance yang telah dihitung. Besarnya tarif tersebut telah ditetapkan oleh perusahaan.

f. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflansi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan

pada tingkat harga, sedangkan inflasi desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produk sehingga mengakibatkan harga produk-produk yang dihasilkan meningkat.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; inflasi berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun.

PT Pos Indonesia menetapkan besar inflasi untuk perhitungan harga pokok jasa ini adalah sebesar 8%. Dalam menetapkan nilai inflasi tersebut, perusahaan mengacu pada nilai inflasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai inflasi pada perhitungan harga pokok jasa, didapat dari 8% x (jumlah biaya dalam negeri + biaya allowance + biaya overhead).

g. Biaya Angkutan Udara Luar Negeri

Biaya angkutan luar negeri ini telah ditetapkan oleh pos internasional. Pos Internasional menetapkan 1 SDR = USD 1. 5639, jarak yang ditempuh untuk mengirim paket pos ke Negara Jepang adalah sejauh 6000 Km. Maka, biaya angkutan luar negeri per gram per satu kali jalan adalah sebesar $ 0.0047.

h. Tarif Ganti Ongkos

Tarif ganti ongkos pengiriman paket pos dengan tujuan luar negeri sepenuhnya telah ditetapkan oleh pos internasional dalam surat ketetapan Pos Internasional No 894/SBU Pos Int/0609 tanggal 29 Juni 2009. Ganti ongkos per item pulang pergi sebesar SDR 5.75 = USD 8.99 dan ganti ongkos per Kg pulang pergi sebesar SDR 0.57 = USD 0.89.

Dalam perhitungan harga pokok jasa dengan tujuan Negara Jepang,tidak dikenakan biaya *air conveyance duse*, biaya ADM dan *security charge*. Ini sesuai dengan ketetapan oleh pos internasional melalui surat ketetapan Pos Internasional No 894/SBU Pos Int/0609 tanggal 29 Juni 2009.

4.1.3 Perhitungan Harga Pokok Jasa Untuk Penetapan Tarif Pengiriman Paket Internasional (tujuan Jepang) Di PT Pos Indonesia

4.1.3.1 Perhitungan Harga Pokok Jasa Di PT Pos Indonesia

Perhitungan harga pokok jasa yang dilakukan oleh perusahaan tidak secara spesifik menghitung menurut asal wilayah paket pos tersebut dikirim dan itu berdampak pada salah satu komponen biaya dalam menentukan harga pokok jasa, yaitu biaya angkutan dalam negeri. Perusahaan menghitung biaya angkutan dalam negeri dengan cara menjumlahkan total biaya angkut dari seluruh Wilayah Pos di Indonesia dan menghitung rata-rata biaya angkut tersebut (baik dalam Rp maupun USD). Sehingga tarif yang dihasilkan merupakan tarif tunggal untuk semua Wilayah Pos di Indonesia, artinya dari manapun pelanggan mengirim paket pos

internasional tersebut tarif yang dikenakan akan sama. Rumus perhitungan harga pokok jasa tersebut adalah :

Biaya Langsung Dalam Negeri (DN) :		
a. Biaya *handling* kantor pos negara asal	XXX	
b. Biaya angkutan udara dalam negeri	XXX	
c. Hadling KTSH (Kantor Tukar Soekarno-Hatta)	XXX	+
d. SUB JUMLAH BIAYA DN		**XXX**
Biaya Langsung Luar negeri (LN) :		
e. Biaya angkutan udara luar negeri	XXX	
f. Tarif ganti ongkos	XXX	
g. *Air conveyance duse*	XXX	
h. Biaya ADM	XXX	
i. *Security charge*	XXX	+
j. SUB JUMLAH BIAYA LANGSUNG LN		**XXX +**
k. JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**XXX**
Biaya Tidak Langsung :		
l. Biaya allowance (5% x d)	XXX	
m. Biaya overhead [15% x (d+k)]	XXX	
n. Inflasi [8% x (d+k+l)]	XXX	+
o. JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG		**XXX +**
p. HARGA POKOK JASA (k+o)		**XXX**

PT Pos Indonesia memiliki beberapa kebijakan dalam menentukan harga pokok jasa. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan harga pokok jasa dilakukan dengan menghitung biaya-biaya yang terkait dalam pengiriman paket internasional tersebut. Biaya-biaya tersebut adalah :
    a. Biaya handling kantor pos Negara asal (*collecting*, proses *outgoing*, proses *incoming*, dan *delivery*).
    b. Biaya angkutan dalam negeri
    c. Biaya handling KTSH (Kantor Tukar Suekarno-Hatta)
    d. Biaya *allowance*
    e. Biaya *overhead*
    f. Inflasi
    g. Biaya angkutan udara luar negeri
    h. Tarif ganti ongkos
    i. Air conveyance dues
    j. Biaya ADM
    k. Security Charge
2. Biaya tenaga kerja langsung dihitung bukan berdasarkan paket yang diterima, melainkan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pos.
3. Nilai *overhead* ditetapkan oleh direktorat keuangan di PT Pos Indonesia. Nilai *overhead* untuk pengririman paket adalah sebesar 15 % dari total biaya dalam negeri dan biaya *allowance*.
4. Tarif yang di tetapkan belum termasuk pajak.

Dalam melakukan perhitungan harga pokok jasa dengan tujuan Negara Jepang, tidak dikenakan biaya *air conveyance dues*. Namun ada beberapa Negara yang dikenakan biaya *air conveyance dues* seperti Australia (Sydney), Belanda (Amsterdam), Perancis dan Negara-negara lainnya. Ini dikarenakan Negara Jepang sendiri tidak menetapkan biaya *air conveyance dues* untuk setiap paket pos internasional yang diterimanya, dan hal ini tercantum dalam surat ketetapan Pos Internasional No 894/SBU Pos Int/0609 tanggal 29 Juni 2009.

4.1.3.2 Penetapan Tarif Pengiriman Paket Internasional Di PT Pos Indonesia

Penetapan tarif pengiriman atau penetapan harga jual untuk produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan yang diatur oleh pemerintah ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Perbedaan dengan penentuan harga jual normal, biaya penuh masa yang akan datang dapat dihitung dengan menggunakan salah satu pendekatan, *variable costing atau full costing*. Sedangkan untuk perusahaan yang diatur oleh pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang dihitung dengan hanya menggunakan pendekatan *full costing* saja, karena pendekatan *variable costing* tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Setiap kenaikan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan yang ditinjau dari segi perhitungan biaya penuh

yang dipakai sebagai perhitungannya dan kewajaran laba yang ditambahkan di atas biaya penuh tersebut.

Perusahaan menetapkan laba yang diharapkan sebesar 34% untuk pengiriman paket pos internasional dengan tujuan Negara Jepang. Perusahaan mempertimbangkannya berdasarkan pengguna jasa (konsumen), pesaing dan biaya yang dikeluarkan.

Perusahaan tidak menghitung harga pokok berdasarkan asal Wilayah Pos paket tersebut dikirim, sehingga harga pokok yang dihasilkan lebih tinggi. Penentuan tarif atau harga jual yang dilakukan perusahaan menambahkan 34% dari harga pokok jasa tersebut. Berikut merupakan perhitungan tarif pengiriman atau harga jual yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 4.4
Tarif Pengiriman yang Dihitung Oleh perusahaan

Berat Paket	Tarif Pengiriman yang Dihitung Oleh perusahaan ($)
0,5 Kg	18,21
1 Kg	22,20
1,5 Kg	27,87
2 Kg	31,92
2,5 Kg	37,60
3 Kg	41,62
3,5 Kg	47,30
4 Kg	51,35
4,5 Kg	57,04
5 Kg	61,08
Per 0,5 Kg	5,68

Sumber : PT. Pos Indonesia (data diolah)
Juli 2010

Dari data tabel diatas tarif pengiriman yang dihitung oleh perusahaan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi hal ini berpengaruh terhadap penentuan harga jual atau tarif yang akan dikenakan kepada konsumen. Jika harga pokok yang dihasilkan tinggi, maka tarif yang akan dikenakan kepada konsumen relatif tinggi. Karena harga pokok tersebut ditambahkan dengan presentanse laba yang diharapkan oleh perusahaan, begitu pula sebaliknya, jika harga pokok rendah maka tarif yang akan dikenakan kepada konsumen relatif rendah.

Dengan tarif yang rendah, perusahaan dapat menarik konsumen lebih banyak lagi untuk menggunakan jas pos dalam melakukan pengiriman barang atau perusahaan dapat juga menaikan tingkat laba yang diharapkan. Sehingga, laba perusahaan akan meningkat dari sebelumnya.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Komponen Biaya Yang Dimasukkan Kedalam Perhitungan Harga Pokok Jasa Pengiriman Paket Pos Internasional Di PT Pos Indonesia

Hasil analisis antara teori dan data yang diperoleh dari perusahaan mengenai komponen biaya yang dimasukkan kedalam perhitungan harga pokok jasa berbeda. Menurut teori Azhar Susanto (2006:24) komponen harga pokok jasa terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Sedangkan menurut data yang diperoleh dari perusahaan PT Pos Indonesia,

komponen harga pokok jasa tersebut terdiri dari biaya *handling*, biaya angkutan dalam negeri, biaya *allowance*, biaya *overhead*, inflasi, biaya angkutan udara luar negeri, biaya tarif ganti ongkos, biaya *air conveyance dues*, biaya ADM, dan biaya *security charge*.

Perbedaan komponen biaya yang dimasukkan kedalam harga pokok jasa ini berbeda dikarenakan PT Pos Indonesia telah menggunakan metode perhitungan sendiri yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana perhitungan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia adalah dengan menjumlahkan semua komponen-komponen yang terlibat dalam harga pokok jasa tersebut.

4.2.2 Analisis Atas Perhitungan Harga Pokok Jasa Untuk Penetapan Tarif Pengiriman Paket Internasional (Tujuan Jepang) Di PT Pos Indonesia

Hasil analisis perhitungan harga pokok jasa untuk penetapan tarif yang diperoleh dari data perusahaan dan juga dari teori telah sesuai. Menurut data perusahaan dan juga teori *Horngren, Foster, dan Datar* yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani mengatakan bahwa untuk penetapan tarif, perhitungan harga pokok jasanya dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan cara *full costing* atau dengan cara *variable costing*. *Full costing* adalah penetapan tarif yang memperhitungkan semua unsur biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* yang bersifat variable maupun bersifat tetap. Sedangkan *variable costing* adalah

penetapan tarif yang hanya memasukkan unsurr-unsur biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* variable.

Tetapi dalam perhitungan harga pokok jasa untuk penetapan tarif ini perusahaan PT Pos Indonesia menetapkan laba yang diharapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 34 % untuk pengiriman paket pos internasional, hal ini karena PT Pos Indonesia mempertimbangkannya berdasarkan pengguna jasa (konsumen), pesaing dan biaya yang dikeluarkan.